

**IMPLEMENTASI HUKUM PENYELENGGARAAN JAMINAN  
KESEHATAN PESERTA NON-PBI OLEH BPJS KESEHATAN DALAM  
PELAYANAN KESEHATAN  
(Studi di BPJS Purwokerto)**

**Oleh:  
Sarah Asma Zahidah  
E1A016044**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum penyelenggaraan jaminan kesehatan peserta non-PBI dalam pelayanan kesehatan dan faktor-faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum penyelenggaraan jaminan kesehatan peserta non-PBI dalam pelayanan kesehatan di BPJS Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan spesifikasi penelitian deskriptifs. Lokasi penelitian pada kantor cabang BPJS Kesehatan Purwokerto. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer dengan wawancara sedangkan data sekunder dengan studi pustaka dan studi dokumenter. Metode pengolahan data dengan reduksi data, display data dan kategorisasi data. Penyajian data dalam bentuk matriks kualitatif dan teks naratif. Metode analisis data dilakukan secara analisis kualitatif dengan menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum penyelenggaraan jaminan kesehatan peserta non-PBI dalam pelayanan kesehatan di BPJS Purwokerto telah terimplementasikan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari parameter yang meliputi efektifnya pelaksanaan pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); efektifnya pelaksanaan memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja; efektifnya tindakan mengumpulkan dan mengelola data peserta JKN; efektifnya pelaksanaan pembiayaan pelayanan kesehatan; dan efektifnya pelaksanaan transfer informasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Adapun faktor-faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum penyelenggaraan jaminan kesehatan peserta non-PBI dalam pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan Purwokerto adalah faktor hukum; faktor penegak hukum; faktor budaya; faktor sarana dan faktor budaya. Faktor-faktor tersebut di atas memiliki kecenderungan yang dapat menghambat dan mendukung implementasi hukum penyelenggaraan jaminan kesehatan peserta non-PBI dalam pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan Purwokerto.

**Kata Kunci** : *Implementasi Hukum Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; Peserta Non-PBI; Pelayanan Kesehatan, Faktor Penegak Hukum; Faktor Budaya*

**THE LEGAL IMPLEMENTATION OF HEALTH INSURANCE FOR  
NON-PBI PARTICIPANTS IN HEALTH SERVICES  
(Studi at BPJS Kesehatan Purwokerto)**

**Oleh:  
Sarah Asma Zahidah  
EIA016044**

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the legal implementation of health insurance for non-PBI participants in health services and the factors that tend to influence the legal implementation of health insurance for non-PBI participants in health services at BPJS Kesehatan Purwokerto. This research uses qualitative research methods with sociological juridical approach, and descriptive research specifications. The research location at the BPJS Kesehatan Purwokerto branch office. The types of data used are primary data and secondary data. The primary data collection method is by interviewing while the secondary data is by literature study and documentary study. Data processing methods with data reduction, data display and data categorization. Presentation of data in the form of a qualitative matrix and narrative text. The data analysis method was carried out by qualitative analysis using content analysis. The results of the study indicate that the implementation of the law on the implementation of health insurance for non-PBI participants in health services at BPJS Kesehatan Purwokerto has been implemented effectively. This can be seen from the parameters that include the effective implementation of the effective implementation of a participant's admission is that no one is denied; Effective implementation of collecting fees from participants and employers according to each category; ffective action of collects and administers data of JKN's participants which easily accessible; effective implementation of health care financing according to health insurance programs; and effective implementation of information transfers of social security programs that are easily accessible to the public and participants. The factors that tend to influence the implementation of the law on the implementation of health insurance for non-PBI participants in health services at BPJS Kesehatan Purwokerto are legal factors; law enforcement factors; cultural factors; facilities and cultural factors. The factors mentioned above have tendencies that can hinder and support the implementation of the law on the implementation of health insurance for non-PBI participants in health services at BPJS Kesehatan Purwokerto.*

**Keywords:** *Implementation of Health Insurance Implementation Law; Non PBI Participants; Health Services, Law Enforcement Factors; Cultural Factor*